

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I	
Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kec. Kemlagi.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III	
Tujuan dan Sasaran	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	30
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV	
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	35
BAB V	
Penutup	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Kemlagi adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2021-2026. Renja Kecamatan Kemlagi tahun 2022 merupakan rencana kerja tahun pertama (I), dalam Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) memperhatikan hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya dan mempertimbangkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, serta penjangkauan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan oleh Pemerintah Desa, sehingga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat tersusun.

Sebagai dokumen Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kecamatan Kemlagi, merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

1. Pembangunan yang mempunyai dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan Kebijakan dan Program Pembangunan dengan sasaran yang terukur;
2. Pembangunan yang sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Pembangunan yang realistis untuk dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah;
4. Pembangunan didasarkan pada skala prioritas, bertahap dan konsisten secara terpadu;
5. Pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Pemerintah Provinsi.

Pembangunan daerah harus mengupayakan peningkatan

pendapatan masyarakat, mewujudkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*). Dalam melaksanakan pembangunan daerah perlu diaplikasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai landasan operasional pelaksanaan pembangunan di daerah setiap tahunnya.

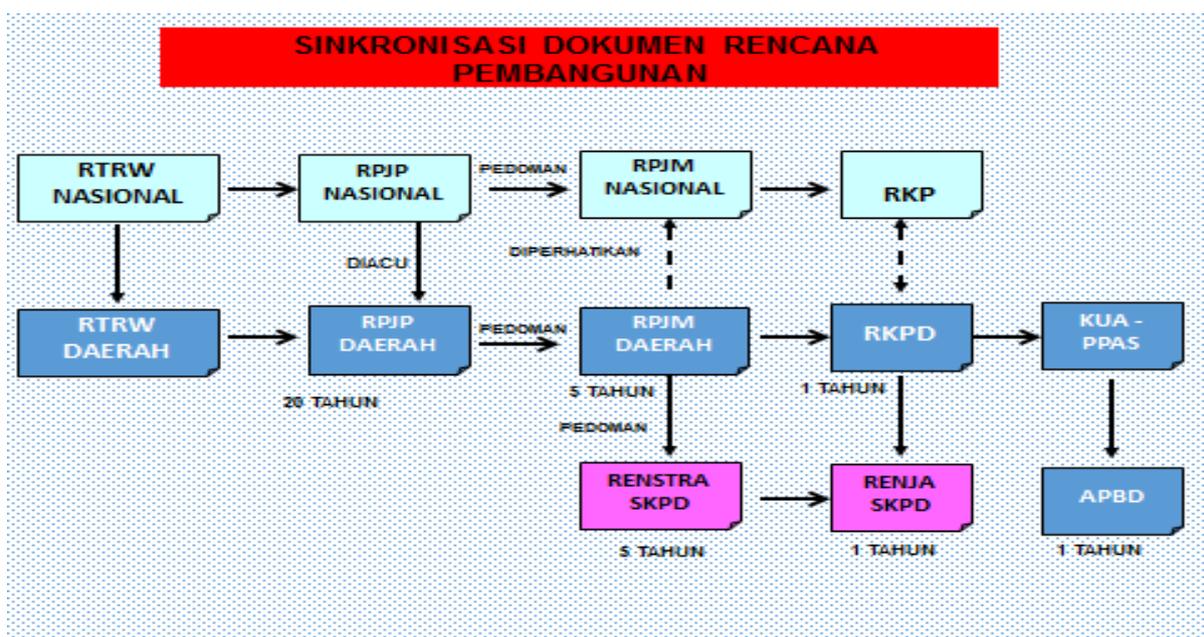
Dengan demikian RKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada RKP dan Program Strategis Nasional Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020. RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2020.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Kemlagi yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Kemlagi adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2021-2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Kemlagi.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.
16. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022 OPD Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun **tujuannya** adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Kemlagi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara

konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3. Sistematika Penyusunan

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kemlagi ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2020, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi mencapai realisasi 94,05%, yang berarti capaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan hampir seluruhnya telah tercapai atau mendekati 100%. Program dan kegiatan yang belum mencapai atau dibawah 90% anatara lain :

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Mojokerto
Kecamatan Kemlagi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi target Kinerja hasil program dan keluar Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4.01	Bidang Administrasi Pemerintahan									
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		73	78			80		
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan		33,902,968	45,363,909	27,855,217	61%			
1.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak kendaraan bermotor yang dapat terbayar		1,600,000	1,700,000	1,419,100	83%			
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll		21,326,400	20,613,100	20,613,100	100%			
01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi		5,000,000	9,000,000	9,000,000	100%			

01.12	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		8,000,000	9,517,370.25	9,497,000	99.80%			
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll		52,012,000	94,034,750	93,650,000	99.60%			
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan		82,775,000	25,000,000	24,510,000	98%			
01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan		26,500,000	28,825,000	28,825,000	100%			
01.23	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan		26,808,960	26,808,960	26,808,960	100%			
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi								
02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		5,000,000	10,000,000	10,000,000	100%			
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas		22,285,000	20,947,800	20,838,912	99%			
02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik		5,943,400	5,000,000	4,850,000	97%			

03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-								
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan pa-kaian dinas PNS serta perlengka-pannya		9,919,000						
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-								
06.05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketemtuan yang berlaku dan tepat waktu		10,000,000	11,772,000	11,772,000	100%			
	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan									
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan									
	Penunjang PATEN			38,150,000	33,590,000	33,590,000	100%			
	Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan			35,500,000	10,925,000	9,915,000	91%			
	Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan			31,000,000	17,012,500	15,812,500	93%			
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat			33,000,000	163,665,250	155,517,125	95%			
	Fasiltasi penyelenggaraan pemerintahan desa									
	Fasiltasi penyelenggaraan pembangunan desa									
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan									

	Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat			51,700,000	68,337,500	61837500	90%			
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2,000,000					10,000,000		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2,000,000							
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2,000,000							
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2,000,000							
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		2,000,000							
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5,000,000							
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3,052,585,178					3,052,585,178		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2,000,000					15,000,000		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5,000,000							
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD		9,000,000							

7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3,000,000						
7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		3,000,000						
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya		15,000,000				12,000,000		
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		20,000,000						
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		6,000,000						
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor		8,000,000				8,000,000		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		78,000,000				68,000,000		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25,000,000				53,000,000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		9,000,000				9,000,000		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4,000,000						
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material Bahan		15,000,000				32,200,000		
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		12,000,000						
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26,000,000				24,000,000		

7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD		20,000,000							
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		30,000,000							
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		30,000,000							
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik		35,000,000					45,228,778		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		28,000,000					27,000,000		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan		34,647,800					24,647,800		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		12,000,000					12,000,000		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya		8,000,000					8,000,000		
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									

7.01.01.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah									
7.01.01.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		6,000,000							
7.01.01.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									
7.01.01.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		8,000,000							
7.01.01.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
7.01.01.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		10,058,680					10,058,680		
7.01.01.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		25,000,000					25,000,000		
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan									
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		15,000,000					49,200,000		

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		20,000,000					48,000,000		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		30,000,000							
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		35,000,000							
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan		30,000,000					52,000,000		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		24,000,000					24,000,000		
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa									
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		10,000,000					7,000,000		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8,000,000					12,000,000		

7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		6,000,000					2,000,000		
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		10,000,000							
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		2,000,000							
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		4,000,000							
			3,748,291,658	500,422,728	602,113,139.25	566,311,414		3,629,920,436		

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2020, dapat diketahui bahwa:

IKU Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi yaitu :

1. Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Cakupan pelayanan umum dan perijinan (PATEN)

Kedua IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan Kerjasama yang terintegrasi untuk meningkatkan Kinerja OPD Kecamatan Kemlagi ;
2. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas pelayanan publik;

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengendalian kegiatan dengan skala prioritas berdasarkan kinerja;
2. Konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak ;
3. Pengembangan kegiatan inovatif dan dengan dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
4. Komitmen pimpinan dan TAPD dalam Pelayanan kepada Masyarakat;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Pelayanan Publik.

Secara lebih rinci, Capaian indikator kinerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C. 30

**Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi
Kabupaten Mojokerto**

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (n-2)	Tahun 2020 (n-1)	Tahun 2021 (n)	Tahun 2022 (n+1)	Tahun 2019 (n-3)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indek Kepuasan Masyarakat			B (75)	B (80)	B (80)	B ()	75	81,09	80		Baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk menentukan isu – isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan – permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kemlagi dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Kemlagi yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan
- c) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- d) Masih banyak kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis home industry dan/atau small industry, termasuk koperasi pertanian yang kurang aktif sehingga peranannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan;
- e) Masih rendahnya inovasi usaha masyarakat sehingga UMKM belum mampu bersaing dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat;
- f) Belum optimalnya upaya mengembangkan usaha ekonomi masyarakat yang mendorong tumbuhnya industri hilir yang kuat dan bersaing untuk mengikuti dinamika pasar sehingga upaya untuk mendorong iklim investasi juga masih kurang;

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kemlagi Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kemlagi Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.31.
 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
 Provinsi/Kabupaten/Kota Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEMLAGI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81%	3,413,232,978	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN KEMLAGI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81%	3,515,629,967	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	14 Dok.	15,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target	14 Dok.	15,450,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	33 Dok.	3,068,585,178	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	33 Dok.	3,160,642,733	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	20 stel	15,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	20 stel	15,450,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	197,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	202,910,000	

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	63,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	64,890,000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN KEMLAGI	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	54,647,800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN KEMLAGI	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	56,287,234	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	35,058,680	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	36,110,440	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975	35,058,680	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975	36,110,440	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam setahun bidang Pemerintahan Desa	81%	300,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam setahun bidang Pemerintahan Desa	81%	309,000,000	
!	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan, Pengawasan dan Pembangunan Daerah	20 Desa	300,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi pembinaan, Pengawasan dan Pembangunan Daerah	20 Desa	309,000,000	
						3,748,291,658					

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2022, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 dengan kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi Tahun 2022.

Jumlah seluruh usulan Desa :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bidang Sarana dan Prasarana | : sebanyak 38 usulan |
| 2. Bidang Ekonomi | : sebanyak 101 usulan |
| 3. Bidang Sosial Budaya | : <u>sebanyak 176 usulan</u> |
| Jumlah susulan Desa | : sebanyak 315 usulan |

Adapun rincian usulan tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto**

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	INFRASTRUKTUR (SARANA DAN PRASARANA)				
1	Pembangunan Cor Jalan Poros Desa	Ds.Pandankrajan - Ds.Mojodowo - Ds.Mojowatesrejo	Jalan Rusak Berat	6 x 2100 M	
2	Pembangunan Cor Jalan Poros Desa	Ds.Mojosarirejo s/d Ds.Mojowiryono	Jalan Rusak Berat	6 x 1500 M	
3	Pembangunan Cor Jalan Poros Desa	Ds.Japanan s/d Ds.Mojokumpul	Jalan Rusak Berat	6 x 2000 M	
4	Pembangunan Cor Jalan Poros Desa	Ds.Mojokusumo s/d Ds.Mojodadi	Jalan Rusak Berat	6 x 1000 M	
5	Pembangunan Cor Jalan Poros Desa	Ds.Kelompok Ds.Mojogebang s/d Ds.Mojowono	Jalan rusak dan sebagai akses ke sekolah SMKN	1800x5 M	
6	Pembangunan Cor Jalan Poros Desa	Dsn.Watespinggir Dss.Watesprojo	Jalan rusak dan merupakan jalan perbatasan Kabupaten Mojokerto dan Jombang	650x5 M	
1	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Balongjati Ds.Mojowatesrejo	Jalan sudah rusak berat dan sering Banjir	1500x4 M	

2	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Pandantoyo-Pandankuning Ds.Pandankrajan	Memperlancar Transportasi	821x5 M	
3	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Sambigede Desa Mojokumpul	Jalan Lingkungan Rusak	2000x4 M	
4	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Sidoleh, Kanigoro lor, Kanigoro kidul, Gebangsari, Pilanggrowok Ds.Mojopilang	Jalan Lingkungan rusak	500x3 M	
5	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Betro Barat RT 01 RW 04 Ds.Betro	Jalan masih tanah dan saat hujan tidak bisa di lewati	350x4 M	
6	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Betro Timur Ds.Betro	Jalan masih tanah dan saat hujan tidak bisa di lewati	612x4 M	
7	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Betro Timur RT.3 RW 01 Jl.Makaman dowo Ds.Betro	Jalan masih tanah dan saat hujan tidak bisa di lewati	350x4 M	
8	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Betro Barat RT.1 RW 03 dan RT.02 RW.03 Ds.Betro	Jalan masih tanah dan saat hujan tidak bisa di lewati	350x4 M	
9	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Dempol lor Ds.Mojogebang	Jalan sudah rusak berat	650x5 M	
10	Pembangunan Jalan Cor	dsn.Slempit-Gondoruso Ds.Mojokusumo	Jalan sudah rusak berat	1000x6 M	
11	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Rembu kidul s/d Rembu Lor Ds.Japanan	Rusak parah dan berlubang sehingga mengganggu transportasi	1500x6 M	

12	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Gondoruso s/d Mojokusumo	Rusak parah dan berlubang sehingga mengganggu transportasi	900x6 M	
13	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Japanan Kidul s/d Gondoruso Ds.Japanan	Rusak parah dan berlubang sehingga mengganggu transportasi	1900x3 M	
14	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Sambikerep RT.03 s/d RT.04 Ds.Pandankrajan	Memperlancar transportasi	821x3 M	
15	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Sambikerep RT 03 RW.04 Ds.Pandankrajan	Memperlancar transportasi	250x3 M	
16	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Pandantoyo RT 07- 09 Ds.Pandankrajan	Memperlancar transportasi	210x3 M	
17	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Pandan kuning RT 16 Ds.Pandankrajan	Memperlancar transportasi	170x3,5 M	
18	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Sambikerep RT 04 Ds.Pandankrajan	Memperlancar transportasi	305x3 M	
19	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Pandan kuning RT 15 (P.Kasino) Ds.Pandankrajan	Memperlancar transportasi	150x3 M	
20	Pembangunan Jalan Cor	Dsn.Bulu-Pudo Ds.Mojosarirejo	Memperlancar transportasi	1600x5 M	
21	Pembangunan Jalan Cor Lingkungan	Dsn.Pudo, Bulu, Sugihwaras, Balongkapas,Putat Ds.Mojosarirejo	Memperlancar transportasi	2000x4 M	
22	Pembangunan Jalan Cor Lingkungan	Dsn.Jompong Ds.Beratkulon	Memperlancar transportasi	600x6 M	
23	Pembangunan Jalan Cor Lingkungan	Dsn.Wonorejo Ds.Mojowono - ke Desa Pandankrajan	Jalan rusak berat, Akses pendidikan terganggu dan penghubung antar Desa	785x6 M	

24	Pembangunan Jalan Cor Lingkungan	Dsn.Trunengwetan dan dsn.Segawe Ds.Mojowono	Jalan rusak berat, Akses pendidikan terganggu dan penghubung antar Dusun	978x6 M	
25	Pembangunan Jalan Cor Lingkungan	Dsn.Sugihanyar Ds.Mojorejo	Jalan rusak berat, Akses pendidikan terganggu dan penghubung antar Dusun	536x3 M	
26	Rehabilitasi JalanLingkungan	Ds.Tanjungan	Jalan rusak berat dan penghubung antar Dusun	5000 M	
1	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dsn.Sidowiryo dan dsn.Jompong Ds.Mojowiryo	Saat musim hujan rawan longsor dan mengakibatkan jalan tergerus	365 M	
2	TPT Jalab Usaha Tani	Desa Mojowiryo	Saat musim hujan rawan longsor dan mengakibatkan jalan tergerus	3000 M	
3	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dsn.Semampir kidul Dsn.Sambigede DesaMojokumpul	Saat musim hujan rawan longsor dan mengakibatkan jalan tergerus	3000x1.5 M	
4	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Dsn.Kedungbulus Ds.Watesprojo	Sering terjadi banjir dan longsor	750 M	
5	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Ds.Tanjungan	Sering terjadi banjir dan longsor	4000 M	
6	Tembok Penahan Tanah (TPT)	Di Jembatan mbak ratu Ds.Kemlagi	Sering terjadi banjir dan longsor		

	BIDANG EKONOMI				
1	Pembangunan Drainase	Dsn.Sambigede Ds.Mojokumpul	Malancarkan saluran pengairan	750x75x50 M	
2	Pembangunan Drainase	Dsn.Sidoleh, Kanigoro lor, Kanigoro kidul, Gebangsari, Pilanggrowok Ds.Mojopilang	Aliran kurang lancar dan sering banjir	500 M	
3	Pembangunan Drainase	Dsn.Jatibabah Ds.Mojowatesrejo	Aliran kurang lancar dan sering banjir	2000 M	
4	Pembangunan Drainase	Dsn.Pandansari RT.11-14 Ds.Pandankrajan	Aliran kurang lancar dan sering banjir	315 M	
5	Pembangunan Drainase	Dsn.Pandan toyo RT.10 Ds.Pandankrajan	Aliran kurang lancar dan sering banjir	112 M	
6	Pembangunan Drainase	Dsn.Pandan kuning RT.20 Ds.Pandankrajan	Aliran kurang lancar dan sering banjir	225 M	
7	Pembangunan Drainase	Dsn.Pandan sari RT.11 Ds.Pandankrajan	Aliran kurang lancar dan sering banjir	235 M	
8	Pembangunan Drainase	Dsn.Sambikerep RT.01 Ds.Pandankrajan	Aliran kurang lancar dan sering banjir	150 M	
9	Pembangunan Drainase	Dsn.Pandankuning RT.19 Ds.Pandankrajan	Aliran kurang lancar dan sering banjir	280 M	

10	Peningkatan Jaringan Irigasi	Ds.Tanjungan	Rusak berat	400 M	
11	Pembangunan Sarana air bersih	Ds.Tanjungan	Belum ada jaringan air bersih	1200 M	
1	Pembangunan Jembatan	Dsn.Sidoleh Ds.Mojopilang	Akses hasil pertanian belum ada	25x3 M	
2	Pembangunan Jembatan	Dsn.Bolorejo Ds.Mojojajar	Jembatan yang ada sangat sempit sehingga sulit untuk mengangkut hasil pertanian	1 Unit	
3	Pembangunan Jembatan	Dsn.Kembangan Ds.Mojojajar	Jembatan yang ada sangat sempit sehingga sulit untuk mengangkut hasil pertanian	1 Unit	
4	Pembangunan Jembatan	Dsn. Tuguhrejo Ds.Mojojajar	Jembatan yang ada sangat sempit sehingga sulit untuk mengangkut hasil pertanian	1 Unit	
5	Pembangunan Jembatan	Dsn.Balongjati dan Jatibabah Ds.Mojowatesrejo	Rusak Berat	8x3 M	
6	Pembangunan Jembatan	Dsn.Mojodow - Jati Desa Mojodowo	Rusak Berat	8x10x3 M	
7	Pembangunan Jembatan	Dsn.Kanigoro Ds.Mojokusumo	Rusak Berat	10x7x3 M	

8	Pembangunan Jembatan	Dsn.Sambikerep Ds.Pandankrajan	Sebagai penghubung antar dusun dan pemerlancar aliran air	2 Unit	
9	Pembangunan Jembatan	Dsn.Beratselatan Ds.Beratkulon	Sebagai penghubung antar dusun dan sangat mendesak	6x15 M	
10	Pembangunan Jembatan	Dsn.Berat Tengah Ds.Beratkulon	Sebagai penghubung antar dusun dan sangat mendesak	6x15 M	
1	Pembangunan Gorong gorong	Dsn.Jatikumpul Ds Mojokumpul	Sering terjadi banjir	840x1.5x1 M	
1	Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Mojowiryo	Jalan rusak dan menyebabkan mobilitas petani terganggu	3000 M	
2	Jalan Usaha Tani (JUT)	Ds. Semampir Kidul, dsn.Sambigede Desa Mojokumpul	Mobilitas hasil pertanian supaya lancar	1500x4 M	
3	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Bakalan RT 005 RW 002 Ds.Mojodadi	Mobilitas hasil pertanian supaya lancar	6x1000 M	
4	Pembangunan Jalan Usaha Tani (kalimati 1)	Dsn.Kalimati RT 005 RW 002 Desa Mojodadi	Mobilitas hasil pertanian supaya lancar	6x1000 M	
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani (kalimati 2)	Dsn.Kalimati RT 005 RW 002 Desa Mojodadi	Mobilitas hasil pertanian supaya lancar	6x1000 M	
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Bakalan RT 003 RW 002 Ds.Mojodadi	Mobilitas hasil pertanian supaya lancar	6x1000 M	
7	Pembangunan Jalan	Dsn.Gapuro Ds.Mojojajar	Jalan pertanian masih berupa tanah		

8	Pembangunan Jalan	Dsn.Kembangan Ds.Mojojajar	Jalan pertanian masih berupa tanah		
9	Pembangunan Jalan	Dsn.Betro Timur RT.5 RW.01 Ds.Betro	Jalan pertanian masih berupa tanah	825x4 M	
10	Pembangunan Jalan	Jalan sawah ketoan Ds.Mojogebang	Petani susah mengangkut hasil pertanian	720x6 M	
11	Pembangunan Jalan	Jalan sawah waung Ds.Mojogebang	Petani susah mengangkut hasil pertanian	725x5 M	
12	Pembangunan Jalan	Jalan sawah PAL Ds.Mojogebang	Petani susah mengangkut hasil pertanian	350x5 M	
13	Pembangunan Jalan	Jalan sawah Jompong Ds.Mojogebang	Petani susah mengangkut hasil pertanian	350x6 M	
14	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Watespinggir Ds.Watesprojo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	340x 5 M	
15	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Ds.Mojowatesrejo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	5000x 5 M	
16	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Sidomulyo Ds.Mojodowo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	4x200 M	
17	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Sidomulyo-Medowo Ds.Mojodowo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	4x300 M	
18	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Medowo Ds.Mojodowo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	4x150 M	

19	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Slempit Ds.Mojokusumo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	1000x 3 M	
20	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Kajangan lor Ds.Mojokusumo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	850x3 M	
21	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Kajangan kidul Ds.Mojokusumo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	1000x3 M	
22	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Kedungrejo Ds.Mojokusumo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	700x3 M	
23	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Kanirejo Ds.Mojokusumo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	800x3 M	
24	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Kedungsari Ds.Kedungsari	Petani susah mengangkut hasil pertanian	500x3 M	
25	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Ngogri Ds.Kedungsari	Petani susah mengangkut hasil pertanian	300x3 M	
26	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Pesantren Ds.Kedungsari	Petani susah mengangkut hasil pertanian	300x3 M	
27	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Sidowangun Ds.Kedungsari	Petani susah mengangkut hasil pertanian	500x3 M	

28	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Pudo, Bulu, Sugihwaras, Balongkapas, Putat Ds.Mojosarirejo	Petani susah mengangkut hasil pertanian	1000x4 M	
29	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dsn.Kemlagi selatan Ds.Kemlagi	Petani susah mengangkut hasil pertanian		
30	Peningkatan jalan	Ds.Tanjungan	Kalo penghujan tidak bisa di lewati karena masih tanah	15000 M	
31	Pembuatan Jalan Baru	Ds.Tanjungan	Sebagai jalan alternatif	500 M	
32	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Ds.Mojowono	Petani susah mengangkut hasil pertanian		
1	Pembangunan Paving Jalan	Dsn.Betro Barat RT 02 RW 04 Ds.Betro	Jalan masih tanah dan saat hujan tidak bisa di lewati	3x82	
2	Pembangunan Paving Jalan	Dsn.Betro Timur (lumpangsari) Ds.Betro	Jalan masih tanah dan saat hujan tidak bisa di lewati	3x100 M	
1	Pembangunan Jalan Tembus Dsn.Kalimati ke dsn.Bakalan	Dsn.kalimati RT 004 Rw.001 Ds.Mojodadi	Terhambatnya perekonomian warga sekitar karena belum adanya jalan penghubung antar dusun	3.5x1000 M	
1	Normalisasi Sungai	Desa Mojowiryo	Sungai megalami	950 M	

			pendangkalan		
2	Normalisasi DAM / Waduk	Dsn.Segawe Ds.Mojowono	Rusak berat, Tidak bisa menampung air, lahan pertanian terganggu karena debit air	1 Paket	
1	Pengadaan sumur Bor	Desa Mojowiryo	Pada saat kemarau petani kesulitan air	4 paket	
2	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Bakalan, Kamlimati Ds.Mojodadi	Menanggulangi kekurangan air pada masa kemarau bagi petani	2 Unit	
3	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Bolorejo, Kembangan Ds.Mojojajar	Tidak bergfungsinya dengan baik saluran air sebagai penunjang pertanian masyarakat	2 Unit	
4	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Betro Barat (Jengglong) Ds.Betro	Menanggulangi kekurangan air pada masa kemarau bagi petani	2 Unit	
5	Pengadaan sumur Bor	Ds.Watesprojo	Menanggulangi kekurangan air pada masa kemarau bagi petani	2 Unit	
6	Pengadaan sumur Bor	Ds.Mojowatesrejo	Menanggulangi kekurangan air pada masa kemarau bagi petani	1 Unit	
7	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Kajangan lor dan Slempit Ds.Mojokusumo	Menanggulangi kekurangan air pada masa kemarau bagi petani	2 Unit	

8	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Kedungsari Ds.Kedungsari	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	2 Unit	
9	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Kemiri Ds.Kedungsari	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	2 Unit	
10	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Ngogri Ds.Kedungsari	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	3 Unit	
11	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Pesatren Ds.Kedungsari	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	2 Unit	
12	Pengadaan sumur Bor	Dsn.Sidowangun Ds.Kedungsari	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	5 Unit	
13	Pengadaan sumur Bor	Ds.Mojosarirejo	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	4 Unit	
14	Pengadaan sumur Bor	Ds.Kemlagi	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	2 Unit	

15	Pengadaan sumur Bor	Ds.Mojodowo	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	2 Unit	
16	Pengadaan sumur Bor	Ds.Mojowono	Kurang adanya pengairan di area tanah persawahan yang menyebabkan kurangnya produktifitas pertanian	2 Unit	
1	Bantuan Alat Pertanian	Desa Mojowiryo	Petani banyak yang terdampak pandemi covid 19	1 Paket	
2	Pembangunan tangki septic skala individual pedesaan	Ds.Watesprojo	Banyak warga yang tidak punya tangki septic	15 Unit	
3	Penyediaan Sarana Pendukung Lumbung (Lantai jemur)	ds.Tanjungan	Kurang memadai dan perlu perluasan lantai jemur	200 M	
1	Pengadaan Bantuan Alat kerja bagi masyarakat	Desa Mojowiryo	Banyak usaha masyarakat yang terancam gulung tikar akibat pandemi covid-19	100 Buah	
2	Pengadaan Bantuan Alat kerja bagi masyarakat	Ds.Betro	Kurangnya alat penjang pertanian	1 Unit	
1	Bantuan Benih Unggul	Desa Mojowiryo	Masyarakat kesulitan mendapatkan benih yang berkualitas	1 Paket	

1	Bantuan Hewan Ternak Sapi	Desa Mojowiryo	Masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian akibat pandemi covid 19	1 Paket	
2	Bantuan Hewan Ternak Sapi	Ds.Watesprojo	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	50 Ekor	
3	Bantuan Hewan Ternak Sapi	Ds.Mojowatesrejo	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	1 Paket	
4	Bantuan Hewan Ternak Sapi	Ds.Tanjungan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	50 ekor	
5	Bantuan Hewan Ternak Sapi	Ds.Kemlagi	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	50 ekor	
1	Pembangunan Kandang Sapi bagi masyarakat	Dsn.Kalimati, Kedungwaru, Bakalan Desa Mojodadi	Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat	3 Lokal	
2	Pembangunan Kandang Sapi bagi masyarakat	Dsn.Bolorejo, Tuguhrejo, Kembangan,Sumpersari,Gapuro Ds.Mojojajar	Banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan	5 Unit	
3	Pembangunan Kandang Sapi bagi masyarakat	Dsn.Betro Timur Ds.Betro	Lingkungan agar tetap terjaga dari polusi	1 Unit	
4	Pembangunan Kandang Sapi bagi masyarakat	Ds.Tanjungan	Banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan	1 Unit	
5	Pembangunan Kandang Sapi bagi masyarakat	Dsn.Slempit, Kedungrejo, Kanirejo, Kajangan lor, Kajangan kidul Ds.Mojokusumo	Banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan	5 Unit	

6	Pembangunan Kandang Sapi bagi masyarakat	Ds.Mojodowo	Banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan	2 Unit	
7	Pembangunan Kandang Sapi bagi masyarakat	Ds.Mojowono	Banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan	1 Unit	
1	Pengembangan Pasar Desa	Ds.Kemlagi	meningkatkan perekonomian		
2	Pembangunan Kios/Pertokoan	Dsn.Kanigoro kidul Ds.Mojopilang	Jauh dari pasar	1 Paket	
3	Pembangunan Gedung serba guna	Dsn.Kajangan lor Ds.Mojokusumo	Gedung sudah rusak berat	12x8 M	
4	Bantuan Gerobak bagi pelaku UMKM	Ds.Tanjungan	Belum punya gerobak yang memadai	8 Unit	
5	Pembangunan Pujasera	Dsn.Gumul Ds.Mojorejo	Peningkatan perekonomian masyarakat desa	42x30 M	
6	Pembangunan Kios Cindramata	Ds.Tanjungan	Belum ada sebagai penunjang eko wisata	10 Unit	
7	Pembangunan Menara Pandang (Viewer Deck)	Ds.Tanjungan	Belum ada sebagai penunjang eko wisata	1 Unit	
8	Pembuatan Ruang ganti	Ds.Tanjungan	Belum ada sebagai penunjang eko wisata	1 Unit	
9	Pembuatan tempat parkir	Ds.Tanjungan	Belum memadai sebagai penunjang eko wisata	1000 M2	
	BIDANG SOSIAL BUDAYA				

1	Pembangunan / Rehab Balai Desa	Ds.Betro	Fasilitas Pemerintahan Desa yang rusak dan perlu penanganan	14x14 M	
2	Pembanguan Balai Desa	Ds.Mojowatesrejo	Fasilitas Pemerintahan Desa yang rusak dan perlu penanganan	I Unit	
3	Pembangunan Gedung kantor desa	Ds.Mojodowo	Rusak	6x8 M	
4	Pembangunan Balai Desa	Ds.Mojodowo	Rehab	10x11 M	
1	Rehabilitasi Gedung sekolah	Desa Mojowiryo	Kondisi gedung dan atap sekolah sudah banyak yang rusak	1 Paket	
2	Pembangunan Gedung TK	Dsn.Kanirejo Ds.Mojokusumo	Gedung perlu perluasan karena tidak sesuai dengan jumlah murid	12x7 M	
1	Pengadaan Sarana Belajar PAUD	Ds.Tanjungan	Sarana tidak lengkap	5 Unit	
2	Pembangunan tempat bermain anak	ds.Tanjungan	belum ada	10 Unit	
3	Pembangunan eko wisata tanjungan	Ds.Tanjungan	perlu perawatan khusus	1 Paket	
4	Pembangunan Dermaga Wisata	Ds.Tanjungan	Rusak dan perlu perawatan	2 Unit	
5	Pembangunan Panggung kesenian	Ds.Tanjungan	perlu perbaikan	1 Unit	

6	Pembuatan Gazebo	Ds.Tanjungan	Belum ada dan sebagai penunjang pengunjung eko wisata	10 Unit	
1	Pembangunan Ponkesdes	Dsn.Sidoleh Ds.Mojopilang	Belim Punya gedung sendiri	10x9 M	
1	Pengadaan Alat Foging	Ds.Japanan	Sebagai sarana pemberantasan sarang nyamuk	1 Unit	
2	Pengadaan Alat Foging	Ds.Tanjungan	Sebagai sarana pemberantasan sarang nyamuk	4 Unit	
1	Pembangunan TPQ	Desa Mojowiryo	Kegiatan mengaji masih menumpang di masjid dan musholla dan rumah warga	1 Paket	
2	Pembangunan Masjid	Ds.Mojowatesrejo	Kenyamanan dalam melaksanakan ibadah	1 Unit	
1	Bedah Rumah bagi rumah tidak layak huni	Desa Mojowiryo	Masih banyak rumah warga yang kondisinya tidak layak huni	50 Rumah	
1	Pembangunan Gapura Pintu masuk desa	Desa Mojowiryo	Sebagai ikon Desa	1 Paket	
2	Pembangunan Gapuro Batas Desa	Desa Mojowiryo	Batas desa selama ini tidak ada	2 Paket	

3	Pembangunan Pagar Balai Desa	Desa Mojowiryo	Kondisinya rusak	400 M	
4	Pembangunan Pagar Makam dan Punden	Desa Mojowiryo	Kondisinya rusak dan perlu perawatan	8 paket	
5	Pelestarian Cagar Budaya	Ds.Betro	Untuk meningkatkan pengetahuan sejarah dan kebudayaan serta berdampak pada bidang ekonomi dan pariwisata	2 Unit	
6	Pemugaran Situs/Cagar Budaya	Ds.Tanjungan	Tidak terawat dengan baik	2 Unit	
7	Pembangunan Monumen Desa/ Renovasi / Penambahan Bangunan	Ds.Kedungsari	Melestarikan cagar budaya dan meningkatkan perekonomian masyarakat	1 Paket	
8	Pembangunan Gapuro Perbatasan	ds.Mojowatesrejo	Batas wilayah yang tidak ada	1 Unit	
1	Pengadaan buku bacaan dan buku penunjang pembelajaran anak	Desa Mojowiryo	Anaka anak lebih sering bermain HP dan menghabiskan waktu dengan sia sia	1 Paket	
1	Pengadaan Lampu PJU	Desa Mojowiryo	Saat malam hari sangat membahayakan pengguna jalan	30 Buah	

1	Bantuan Modal kerja untuk masyarakat	Desa Mojowiryo	Banyak kegiatan usaha kecil hampir gulung tikar terdampak pandemi covid 19	1 Paket	
2	Bantuan Modal kerja untuk peningkatan Usaha masyarakat Miskin	Ds.Betro	Peningkatan Perekonomian masyarakat miskin	1 Unit	
3	Peningkatan Ketrampilan Karang Taruna	Ds.Betro	Untuk meningkatkan kapasitas karang taruna	1 Unit	
1	Bantuan Kursi Roda	Dersa Mojowiryo	Penyandang disabilitas kesulitan berjalan	5 Buah	
1	Bantuan tempat sampah dan Bak pembuangan sampah untuk masyarakat	Desa Mojowiryo	Banyak warga masih membuang sampah di sungai	1 Paket	
2	Program Pengendalian dan Pengelolaan Sampah	Ds.Mojowono	Banyak warga membuang sampah di sungai dan sawah	1 Paket	
1	Bantuan Alat musik Jawa (gamelan)	Ds.Betro	Untuk menumbuhkan pengetahuan tentang alat musik daerah	1 Unit	
2	Bantuan Alat musik Jawa (Pelog Slendro)	Ds.Japanan	Di Desa terdapat sanggar seni yang membutuhkan alat keseneian	1 Unit	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kemlagi ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan OPD dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat meberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan

penetapan indikator sasaran, atau disebut juga sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka pada tahun 2022 dilakukan revidi untuk perbaikan sistem akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran strategis yang baru sebagai berikut :

Misi 3: Mewujudkan tata Kelola Pemerintah yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan		
Tujuan 3 :	Sasaran 7:	Strategi :
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Memiliki tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat
Tujuan 8:	Sasaran 8:	Strategi :
Meningkatnya pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik

3.4 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-3708 Tahun 2020. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 6. Penyediaan Bahan / Material 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

	Kantor atau Bangunan Lainnya
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
C.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kemlagi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutu han Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	KECAMATAN KEMLAGI	81%	3,413,232,978	APBD		100%	3,438,478,324
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		7 Dok.	15,000,000			16,050,000	
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		33 Dok.	3,068,585,178			3,069,705,178	
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		20 stel	15,000,000			16,050,000	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	197,000,000			210,790,000	

7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		100%	63,000,000				67,410,000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	54,647,800				58,473,146
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal	KECAMATAN KEMLAGI	81%	35,058,680	APBD	100%	37,512,788	
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan minimal		975	35,058,680				37,512,788
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan pemerintah desa yang dapatterfasilitasi oleh Kecamatan		81%	300,000,000				321,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		20 Desa	300,000,000				321,000,000
							3,748,291,658		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Usulan Program Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja tahun 2022 Kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut :

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 disajikan pada table berikut :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KECAMATAN KEMLAGI

OPD : KECAMATAN KEMLAGI

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2022	PAGU PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 (Rp.)	SUMBER DANA	KET.
						CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
						TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Mojokerto Aman ; Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kec. Kemlagi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81%					3,413,232,978	3,438,478,324	APBD	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target		15,000,000	16,050,000		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan yang dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen		14 Dokumen	9,000,000	9,630,000		
	7.01.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 dokumen			6,000,000	6,420,000		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	28 Bulan	3,068,585,178	3,069,705,178		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah dokumen Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	28 bulan			3,052,585,178	3,052,585,178		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Jumlah laporan keuangan bulanan	5 lap			16,000,000	17,120,000		

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								IP ASN Perangkat Daerah	20 stell	15,000,000	16,050,000		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	20 stell			15,000,000	16,050,000.00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	197,000,000	210,790,000		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor						Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket			15,000,000	16,050,000		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket			78,000,000	83,460,000		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket			30,000,000	32,100,000		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan						Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	12 bulan			12,000,000	12,840,000		
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				9,000,000	9,630,000		
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	12 bulan			27,000,000	28,890,000		

	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 THL			26,000,000	27,820,000		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	63,000,000	67,410,000		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 paket			35,000,000	37,450,000		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	1 paket			28,000,000	29,960,000		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	54,647,800	58,473,146		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan					Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 Unit			34,647,800	37,073,146		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya					Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	4 Unit			12,000,000	12,840,000		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya					Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket			8,000,000	8,560,000		

	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			81%		20 Fasilitas	35,058,680	37,512,788			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	975 layanan	35,058,680	37,512,788			
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	960 layanan					10,058,680	10,762,787.60		
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	15 layanan					25,000,000	26,750,000.00		
	7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah					Persentase hasil koor dinasi yang ditindak lanjuti	81%						300,000,000	321,000,000	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase hasil koor dinasi yang ditindak lanjuti				Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		300,000,000	321,000,000			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Fasilitas				80 fasilitasi	45,000,000	48,150,000		

	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Fasilitasi			14,000,000	14,980,000		
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Fasilitasi			76,000,000	81,320,000		
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20 Fasilitasi			165,000,000	176,550,000		
												3,748,291,658	3,796,991,112		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mojokerto **“Terwujudkan Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kemlagi. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kemlagi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- 1.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kemlagi berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.
 - b. Kecamatan Kemlagi berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.
- 1.3 Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kemlagi. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Kemlagi juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Kemlagi ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Kemlagi serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Februari 2021
CAMAT KEMLAGI

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos.MM
Pembina
NIP. 19681016 199303 1 007

CASCADING KECAMATAN

VISI :Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan

TUJUAN : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal

Indikator Tujuan : IKM Kecamatan

SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah

Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

(3.143.232.978)

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

**Perencanaan,
Pengggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

(15.000.000)

**Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah**

(3.052.585.178)

**Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah**

(15.000.000)

Administrasi Umum Perangkat Daerah

(197.000.000)

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran								
---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(9.000.000)	(6.000.000)	(3.052.585.178)	(16.000.000)	(15.000.000)	(15.000.000)	(78.000.000)	(30.000.000)	(12.000.000)	(9.000.000)	(27.000.000)	(26.000.000)

Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
--	---	--	---------------------------------	---	--	--	---	--	--	---	---

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (35.058.680)	
Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (10.058.680)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (25.000.000)
Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

(Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti)

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

(300.000.000)

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (45.000.000)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (14.000.000)	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (76.000.000)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (165.000.000)
Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan



Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sistem Informasi
Pengembangan Daerah



Sistem Informasi
Kesempatan Usaha



Sistem Informasi
Pelayanan Publik
Layanan

RANCANGAN AWAL RENCANAN KERJA TAHUN 2022

**KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KEMLAGI
TAHUN 2021**

Jln. Raya Kemlagi, No. 8DS KEMLAGI